

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA UEWAJO KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Titin Hartian ^{1,*}; Irwan Waris ²; Mahfuzat ³;

¹Universita Tadulako, Palu, Indonesia; titinnurdalainawa@gmail.com

²Universita Tadulako, Palu, Indonesia; irwanwaris@yahoo.co.id

³Universita Tadulako, Palu, Indonesia; mahfuzat.lamakampali@gmail.com

*Correspondence : titinnurdalainawa@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *masyarakat nelayan, Morowali Utara, pemberdayaan masyarakat, pesisir, UEwajo.*

Received. : Maret 2026

Revised. : April 2026

Accepted : April 2026

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Uewajo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat nelayan yang ditandai dengan belum meratanya distribusi bantuan perikanan tangkap serta belum berjalannya beberapa aspek pemberdayaan secara maksimal. Penelitian ini menggunakan desain penelitian *kualitatif deskriptif* dengan pendekatan studi kasus. Konsep yang digunakan adalah teori pemberdayaan masyarakat menurut Suaib (2023) yang meliputi aspek kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan keberlanjutan. Penelitian dilaksanakan di Desa Uewajo dengan informan yang terdiri dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Morowali Utara, pemerintah desa, dan masyarakat nelayan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Uewajo dilaksanakan melalui dua sumber, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Morowali Utara dan Pemerintah Desa Uewajo melalui Dana Desa. Aspek partisipasi masyarakat nelayan relatif berjalan meskipun belum optimal, sedangkan aspek kesetaraan belum terpenuhi karena masih terjadi ketidakmerataan distribusi bantuan di antara anggota kelompok nelayan. Aspek keswadayaan atau kemandirian mulai tumbuh pada sebagian nelayan penerima program, namun belum merata, sementara aspek keberlanjutan masih menghadapi kendala dalam hal konsistensi pendampingan dan ketersediaan sumber daya yang berkelanjutan. Penelitian ini memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat nelayan agar lebih merata dan berkelanjutan.

ABSTRACT:

This study aims to determine and analyze the empowerment of fishing communities in Uewajo Village, Bungku Utara District, North Morowali Regency. This research is motivated by the suboptimal implementation of the fishing community empowerment program, which is characterized by the uneven

distribution of capture fisheries assistance and the failure to implement several empowerment aspects optimally. This study uses a descriptive qualitative research design with a case study approach. The concept used is the community empowerment theory according to Suaib (2023), which includes aspects of equality, participation, self-reliance or independence, and sustainability. The study was conducted in Uewajo Village with informants consisting of the Marine Affairs and Fisheries Service of North Morowali Regency, the village government, and the fishing community. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the fishing community empowerment program in Uewajo Village is implemented through two sources, namely the Marine Affairs and Fisheries Service of North Morowali Regency and the Uewajo Village Government through Village Funds. The aspect of fishing community participation is relatively running although not optimal, while the aspect of equality has not been fulfilled because there is still an uneven distribution of assistance among members of the fishing group. Self-reliance and independence have begun to emerge among some fisherfolk who receive the program, but this is not yet evenly distributed. Sustainability still faces challenges in terms of consistent mentoring and the availability of sustainable resources. This research provides evaluation material for local and village governments to improve the effectiveness of the implementation of the fisherfolk community empowerment program to ensure its distribution is more equitable and sustainable.

Pendahuluan

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan penting dalam pembangunan yang bertujuan meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki guna mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan. Konsep pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan, tetapi sebagai proses peningkatan kapasitas agar masyarakat mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta menentukan masa depan secara mandiri (Saputri and Murdiyanto, 2024). Proses ini juga mendorong peningkatan kepercayaan diri, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam perubahan sosial (Susilowati and Nainggolan, 2025).

Pemberdayaan masyarakat di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menekankan pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta pemanfaatan sumber daya sesuai kebutuhan (Presiden Republik Indonesia, 2014). Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menegaskan pentingnya perlindungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor perikanan (Presiden Republik Indonesia, 2016).

Sektor perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian

masyarakat pesisir di Indonesia. Namun demikian, kelompok nelayan masih tergolong rentan terhadap kemiskinan. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menunjukkan bahwa sekitar 11,34% pekerja di sektor perikanan berada dalam kondisi miskin, sehingga diperlukan program pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan (Dewi and Dadiara, 2022).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan belum berjalan optimal. Penelitian (Tanjung, 2016) mengidentifikasi rendahnya keterlibatan nelayan, keterbatasan akses terhadap informasi, teknologi, modal, dan pasar, serta lemahnya pendampingan sebagai faktor penghambat utama. Penelitian (Sinaga and Sitinjak, 2019) menambahkan bahwa faktor eksternal seperti kondisi iklim yang tidak menentu, ketidaktepatan sasaran bantuan, serta keterbatasan akses permodalan turut memperburuk kondisi tersebut. Sementara itu, penelitian (Sukraaliawan, 2020) menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai strategi, seperti penguatan kewirausahaan, penguatan kelembagaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB), peningkatan partisipasi dalam Musrenbang, serta dukungan permodalan bergulir, namun efektivitasnya masih memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Waris and Susanti, 2019) menekankan bahwa permasalahan pemberdayaan masyarakat nelayan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek non-teknologi seperti sosial, budaya, kelembagaan, dan politik, serta aspek teknologi seperti keterbatasan alat tangkap dan penguasaan teknik perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan nelayan perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai dimensi yang mempengaruhi kehidupan nelayan.

Lebih lanjut, penelitian oleh (Waris *et al.*, 2018) bertujuan menyiapkan nelayan agar berdaya dari segi non-teknologi dan teknologi perikanan serta budidaya, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, keluar dari kemiskinan, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Penelitian tersebut juga menghasilkan model strategi pemberdayaan yang digunakan sebagai dasar penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, penelitian ini menekankan pentingnya perumusan strategi pemberdayaan yang komprehensif serta pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan.

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan, sebagian besar masih berfokus pada identifikasi masalah dan perumusan strategi pemberdayaan. Sementara itu, kajian yang menilai efektivitas implementasi program pemberdayaan di tingkat lokal masih terbatas, khususnya yang menggunakan indikator kesetaraan, partisipasi, keswadayaan (kemandirian), dan keberlanjutan program. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kebutuhan akan penelitian yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi pemberdayaan masyarakat nelayan.

Upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di tingkat daerah juga didukung oleh

kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan yang menjadi dasar pelaksanaan program pemberdayaan di daerah tersebut (Bupati Morowali Utara, 2019).

Kabupaten Morowali Utara memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, khususnya di wilayah pesisir, dengan mayoritas masyarakat menggantungkan kehidupan pada aktivitas penangkapan ikan skala kecil dan tradisional. Desa Uewajo di Kecamatan Bungku Utara merupakan salah satu wilayah dengan ketergantungan tinggi terhadap sektor perikanan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap di Kecamatan Bungku Utara mencapai sekitar 555 ton dengan jumlah nelayan sebanyak 442 orang, sehingga sektor ini menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat (Saksono, Nissa' and Suadi, 2023).

Namun demikian, dalam implementasi program pemberdayaan masih ditemukan berbagai permasalahan, terutama terkait distribusi bantuan perikanan tangkap yang belum merata antar kelompok nelayan. Sebagian nelayan menerima bantuan lebih dari satu kali, sementara nelayan lain yang memenuhi kriteria belum memperoleh bantuan. Ketimpangan distribusi ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial serta menghambat pencapaian tujuan pemberdayaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Uewajo, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara dengan menggunakan indikator kesetaraan, partisipasi, keswadayaan (kemandirian), dan keberlanjutan program sebagaimana dikemukakan oleh Suaib (2023). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas program pemberdayaan serta menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk menganalisis dan menggambarkan secara mendalam berbagai kondisi serta fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap aktivitas nelayan serta permasalahan yang dihadapi masyarakat di Desa Uewajo, Kabupaten Morowali Utara. Data diperoleh melalui proses interaksi langsung dengan subjek penelitian sehingga mampu merepresentasikan kondisi empiris secara lebih akurat.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai aktivitas dan kondisi kehidupan nelayan. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Informan berjumlah enam orang yang terdiri atas Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Morowali Utara, Kepala Desa Uewajo, serta empat orang nelayan.

Pemilihan informan didasarkan pada relevansi pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam aktivitas perikanan serta program pemberdayaan masyarakat nelayan.

Pengumpulan data juga didukung melalui dokumentasi dengan menelaah berbagai dokumen, laporan, dan arsip yang berkaitan dengan kondisi perikanan dan aktivitas nelayan di lokasi penelitian. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif, sehingga diperlukan kesiapan konseptual dan teknis sebelum pelaksanaan penelitian. Proses pengumpulan data dibantu dengan penggunaan pedoman wawancara, buku catatan, perangkat telepon genggam untuk dokumentasi dan perekaman, serta laptop untuk pengolahan dan analisis data.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini digunakan untuk memastikan proses analisis dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan saling terkait antar tahapan sehingga menghasilkan temuan penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil

1. Prinsip Kesetaraan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat nelayan pada aspek kesetaraan di Desa Uewajo dilakukan melalui program bantuan perikanan tangkap yang disalurkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Morowali Utara dengan melibatkan pemerintah desa dalam proses seleksi dan pengawasan. Mekanisme penyaluran bantuan dimulai dari pengajuan proposal oleh kelompok nelayan kepada pemerintah desa, dilanjutkan dengan seleksi awal sebelum diteruskan ke dinas terkait. Tahap selanjutnya mencakup verifikasi lapangan dan validasi data penerima untuk memastikan ketepatan sasaran serta menghindari penerimaan bantuan berulang pada kelompok yang sama.

Peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program cukup strategis sebagai penghubung antara nelayan dan pemerintah daerah. Pemerintah desa tidak hanya melakukan seleksi administrasi, tetapi juga melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan. Pola ini menunjukkan adanya koordinasi kelembagaan antara pemerintah desa dan dinas dalam mendukung implementasi program pemberdayaan nelayan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan dalam distribusi bantuan belum sepenuhnya terwujud. Sebagian nelayan menyatakan belum pernah menerima bantuan meskipun telah beberapa kali mengajukan proposal. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan akses terhadap program pemberdayaan. Selain itu, terdapat indikasi bahwa bantuan masih diterima secara berulang oleh kelompok tertentu, sehingga memunculkan persepsi ketidakadilan di kalangan nelayan.

Sebagian nelayan lainnya menilai bahwa program bantuan telah berjalan cukup baik dan mampu menjangkau berbagai kelompok. Bantuan yang diberikan dinilai

sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan serta meningkatkan produktivitas usaha perikanan. Penilaian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan telah memberikan manfaat nyata bagi sebagian penerima.

Perbedaan persepsi tersebut mencerminkan bahwa implementasi program pemberdayaan nelayan masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan distribusi bantuan yang merata. Mekanisme seleksi, verifikasi, dan pendataan yang telah diterapkan belum sepenuhnya mampu menghilangkan kesenjangan akses antar kelompok nelayan.

Secara keseluruhan, upaya pemerintah dalam menerapkan prinsip kesetaraan melalui sistem seleksi dan verifikasi telah berjalan, namun efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan. Peningkatan transparansi penyaluran bantuan, akurasi pendataan penerima, serta optimalisasi koordinasi antara pemerintah desa dan dinas terkait menjadi faktor penting untuk mewujudkan distribusi bantuan yang lebih adil dan merata.

2. Partisipasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan pada aspek partisipasi di Desa Uewajo dilaksanakan melalui pelibatan masyarakat dalam berbagai tahapan program. Keterlibatan nelayan terlihat sejak tahap perencanaan melalui mekanisme pengajuan proposal kelompok kepada pemerintah desa yang kemudian diteruskan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Morowali Utara. Mekanisme ini memberikan ruang bagi nelayan untuk mengusulkan jenis bantuan yang sesuai dengan kebutuhan usaha perikanan yang dijalankan.

Partisipasi nelayan juga terlihat pada tahap pelaksanaan dan evaluasi program. Nelayan berperan sebagai penerima sekaligus pengguna bantuan, serta memiliki kesempatan untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan program. Pemerintah desa bersama dinas terkait melakukan pemantauan dan membuka ruang komunikasi sebagai bagian dari proses evaluasi program pemberdayaan.

Fasilitasi partisipasi masyarakat dilakukan melalui forum musyawarah desa yang diselenggarakan secara berkala. Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat, termasuk nelayan, untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran terkait pelaksanaan program pemberdayaan. Musyawarah desa juga berfungsi sebagai sarana evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan serta media komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat nelayan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi nelayan belum merata. Sebagian nelayan menyatakan tidak selalu menerima undangan musyawarah, sehingga keterlibatan dalam forum tersebut terbatas pada kelompok tertentu. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan akses terhadap proses partisipatif dalam pengambilan keputusan program pemberdayaan.

Sebagian nelayan lainnya menunjukkan tingkat partisipasi yang cukup aktif melalui kehadiran dalam musyawarah dan penyampaian masukan terkait program.

Keterlibatan tersebut mencerminkan adanya kesadaran untuk berpartisipasi dalam proses pemberdayaan. Perbedaan tingkat partisipasi juga dipengaruhi oleh keterbatasan waktu dan kondisi fisik nelayan setelah melakukan aktivitas melaut, sehingga tidak seluruh nelayan dapat mengikuti forum secara langsung. Informasi hasil musyawarah umumnya diperoleh melalui komunikasi informal antar nelayan.

Secara keseluruhan, pemerintah desa dan dinas terkait telah menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat nelayan dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Tingkat efektivitas partisipasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses informasi, distribusi undangan yang belum merata, serta keterbatasan waktu nelayan. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator partisipasi telah terpenuhi, namun memerlukan penguatan agar keterlibatan nelayan dapat berlangsung secara lebih inklusif dan merata pada setiap tahapan program pemberdayaan.

3. Keswadayaan/Mandiri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan pada aspek kemandirian (keswadayaan) di Desa Uewajo diarahkan pada peningkatan kemampuan nelayan dalam mengelola usaha perikanan secara mandiri. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Morowali Utara tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga mendorong pemanfaatan bantuan sebagai sarana pengembangan usaha yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

Upaya penguatan kemandirian juga dilakukan melalui pendampingan dan penguatan kelembagaan kelompok nelayan di tingkat desa. Pemerintah desa mendorong peningkatan kapasitas melalui pelatihan pengolahan hasil tangkapan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan nelayan dalam menghasilkan produk bernilai tambah, seperti ikan asin dan abon ikan, sehingga sumber pendapatan tidak hanya bergantung pada penjualan ikan segar yang fluktuatif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian nelayan telah mengalami peningkatan kapasitas dalam pengelolaan usaha perikanan. Perubahan tersebut terlihat dari kemampuan mengatur kegiatan usaha secara lebih terencana, pengelolaan hasil tangkapan yang lebih efisien, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran untuk memperluas jangkauan pasar. Selain itu, nelayan mulai menerapkan perencanaan operasional sebelum melaut, termasuk persiapan alat tangkap dan kebutuhan pendukung secara lebih sistematis.

Tingkat kemandirian yang terbentuk masih menunjukkan variasi antar nelayan. Sebagian nelayan telah mampu menjalankan usaha secara lebih mandiri setelah memperoleh manfaat dari program pemberdayaan. Sebagian lainnya belum merasakan dampak secara langsung, terutama karena keterbatasan akses terhadap bantuan atau tidak lagi menerima program dalam periode tertentu. Kondisi ini mendorong sebagian nelayan untuk lebih mengandalkan aktivitas melaut atau pekerjaan alternatif di luar sektor perikanan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Secara keseluruhan, program pemberdayaan nelayan di Desa Uewajo telah berkontribusi dalam membangun kemandirian, terutama bagi nelayan yang aktif terlibat dan mampu memanfaatkan bantuan secara optimal. Tingkat kemandirian yang belum merata menunjukkan perlunya penguatan dalam aspek pemerataan akses program, keberlanjutan pendampingan, serta peningkatan kapasitas nelayan secara menyeluruh agar manfaat pemberdayaan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

4. Keberlanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan pada aspek keberlanjutan di Desa Uewajo diarahkan pada penguatan kemampuan nelayan dalam menjalankan usaha perikanan secara terencana dan berkelanjutan. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Morowali Utara tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga menekankan pembentukan pola kerja yang lebih teratur, sistematis, dan berorientasi jangka panjang. Pembinaan dilakukan untuk mendorong nelayan mempersiapkan kebutuhan operasional sebelum melaut, mengelola hasil tangkapan secara lebih efisien, serta memanfaatkan hasil tangkapan secara produktif.

Keberlanjutan program juga didukung oleh peran pemerintah desa melalui pendampingan dan koordinasi dengan dinas terkait. Upaya ini bertujuan memastikan bahwa program yang telah dilaksanakan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan. Keberlanjutan pelaksanaan program dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya pendukung, termasuk anggaran, fasilitas, dan tenaga pendamping yang memadai.

Sebagian nelayan menilai bahwa program pemberdayaan memberikan manfaat jangka panjang, terutama dalam meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan usaha perikanan. Manfaat tersebut terlihat dari kemampuan mengatur usaha, memanfaatkan bantuan secara optimal, serta peningkatan keterampilan dalam mengelola hasil tangkapan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa manfaat program belum dirasakan secara merata oleh seluruh nelayan. Sebagian nelayan menyatakan tidak lagi menerima bantuan dalam periode tertentu, sehingga dampak program tidak dirasakan secara berkelanjutan. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pemerataan akses dan distribusi program pemberdayaan.

Sebagian nelayan menekankan pentingnya pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan manfaat program. Keberlanjutan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh pemberian bantuan, tetapi juga oleh konsistensi pembinaan, penguatan kelembagaan kelompok, serta keterlibatan aktif nelayan dalam mempertahankan kegiatan usaha perikanan.

Secara keseluruhan, program pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Uewajo telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung keberlanjutan usaha perikanan. Efektivitas pelaksanaan program masih memerlukan penguatan pada aspek pemerataan manfaat, konsistensi pendampingan, dan dukungan sumber daya

agar dampak pemberdayaan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh nelayan.

Pembahasan

1. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam program yang berkaitan dengan distribusi bantuan pemerintah. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat nelayan, kesetaraan merujuk pada adanya kesempatan yang sama bagi seluruh nelayan untuk mengakses program bantuan tanpa diskriminasi atau dominasi kelompok tertentu. Hasil penelitian di Desa Uewajo, Kecamatan Bungku Utara, menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Morowali Utara telah berupaya menerapkan prinsip tersebut dalam penyaluran bantuan perikanan tangkap.

Upaya penerapan kesetaraan tercermin dalam mekanisme penyaluran bantuan yang meliputi verifikasi lapangan, penggunaan basis data penerima, serta pembatasan penerima bantuan bagi nelayan yang telah memperoleh bantuan pada periode sebelumnya. Pemerintah desa turut dilibatkan dalam proses seleksi awal proposal kelompok nelayan sebelum diteruskan ke dinas terkait. Mekanisme ini menunjukkan adanya upaya untuk membangun sistem distribusi bantuan yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel.

Konsep kesetaraan dalam pemberdayaan masyarakat menurut (Suaib, 2023) tidak hanya menekankan pemerataan bantuan, tetapi juga mencakup keterbukaan proses, akuntabilitas, serta akses yang adil bagi seluruh anggota masyarakat. Keterlibatan pemerintah desa dan pelaksanaan verifikasi oleh dinas menunjukkan adanya upaya menjaga prinsip keadilan dalam distribusi bantuan. Meskipun demikian, implementasi di tingkat lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian nelayan belum merasakan distribusi bantuan secara merata. Beberapa nelayan mengaku belum menerima bantuan dalam beberapa tahun terakhir meskipun telah berulang kali mengajukan proposal. Indikasi penerimaan bantuan secara berulang oleh kelompok tertentu juga muncul dalam persepsi nelayan. Kondisi ini memunculkan persepsi ketidakadilan dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan.

Persepsi berbeda disampaikan oleh nelayan lain yang menilai bahwa bantuan telah menjangkau berbagai kelompok dan sesuai dengan kebutuhan usaha perikanan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa pengalaman akses terhadap bantuan memengaruhi penilaian nelayan terhadap keberhasilan program. Variasi pengalaman tersebut menegaskan bahwa distribusi bantuan belum sepenuhnya merata secara faktual maupun persepsional.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun mekanisme administratif telah dirancang untuk mendukung kesetaraan, implementasi di lapangan masih

menghadapi kendala. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Ridha, Letak and Chaedir, 2017) yang menunjukkan bahwa program pemberdayaan nelayan belum sepenuhnya efektif akibat ketimpangan distribusi bantuan dan keterbatasan akses informasi.

Hasil penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan temuan (Oktaviani, Alamsyah and Rusdin, 2024) yang menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalis belum berjalan optimal, terutama dalam hal pemerataan bantuan dan pendampingan teknis. Keberhasilan program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lapangan.

Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan penerima bantuan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kesetaraan. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Suharto, 2010) yang menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan prasyarat penting untuk memastikan program berjalan adil dan tepat sasaran. Keterbatasan partisipasi berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan meskipun prosedur administratif telah dilaksanakan.

Kesetaraan dalam program pemberdayaan masyarakat nelayan memerlukan penguatan pada aspek pendataan penerima, transparansi proses seleksi, serta koordinasi antara pemerintah desa dan dinas terkait. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi program juga menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kondisi nyata di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan keadilan distribusi bantuan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemberdayaan.

2. Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan unsur kunci dalam pelaksanaan program pemberdayaan karena menentukan tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat nelayan, partisipasi mencakup keterlibatan aktif nelayan tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Hasil penelitian di Desa Uewajo, Kecamatan Bungku Utara, menunjukkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah desa telah berupaya melibatkan masyarakat nelayan dalam berbagai tahapan program pemberdayaan.

Bentuk partisipasi terlihat pada tahap perencanaan melalui mekanisme pengajuan proposal kelompok nelayan. Mekanisme ini memberikan ruang bagi nelayan untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan bantuan yang relevan dengan kegiatan usaha perikanan. Pemerintah desa juga memfasilitasi partisipasi melalui forum musyawarah desa sebagai sarana penyampaian informasi sekaligus penyerapan aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan program pemberdayaan.

Konsep partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat menurut Suaib (2023) menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan program, mulai

dari perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi yang efektif tidak hanya diukur dari kehadiran, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Habib, 2021).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian nelayan telah berpartisipasi secara aktif dalam forum musyawarah desa. Keterlibatan tersebut terlihat dari kehadiran dan kontribusi dalam penyampaian saran serta masukan terkait program bantuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa forum musyawarah desa telah berfungsi sebagai ruang partisipatif bagi masyarakat nelayan.

Tingkat partisipasi nelayan belum merata di seluruh kelompok masyarakat. Sebagian nelayan tidak selalu menerima informasi atau undangan musyawarah secara merata, sehingga keterlibatan dalam forum masih terbatas pada kelompok tertentu. Keterbatasan waktu dan kondisi fisik setelah aktivitas melaut juga menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya kehadiran sebagian nelayan dalam kegiatan musyawarah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun ruang partisipasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek distribusi informasi dan akses keikutsertaan. Partisipasi yang terbentuk belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan seluruh nelayan secara inklusif dalam proses pemberdayaan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Kusnadi, 2020) yang menunjukkan bahwa forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi sarana partisipasi masyarakat, namun tingkat keterlibatan nelayan masih belum merata karena keterbatasan akses dan kesempatan. Hasil penelitian (Pasaribu, Ahsan and Husain, 2025) juga menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, sementara keterbatasan kapasitas dan keterlibatan menjadi kendala utama. Penelitian (Judijanto *et al.*, 2023) menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan transparansi kebijakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan.

Hasil penelitian di Desa Uewajo menunjukkan bahwa aspek partisipasi telah berjalan, namun belum optimal. Mekanisme pengajuan proposal dan forum musyawarah desa telah menyediakan ruang keterlibatan masyarakat, tetapi masih terdapat kendala berupa keterbatasan distribusi informasi, keterbatasan waktu nelayan, serta belum meratanya keterlibatan dalam setiap tahapan program.

Peningkatan partisipasi masyarakat nelayan memerlukan penguatan sistem komunikasi dan penyebaran informasi yang menjangkau seluruh nelayan. Penyesuaian waktu dan mekanisme musyawarah yang lebih fleksibel juga diperlukan agar dapat diikuti oleh lebih banyak nelayan. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong partisipasi yang lebih inklusif serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan program pemberdayaan.

3. Keswadayaan/Mandiri

Kemandirian (keswadayaan) merupakan indikator penting dalam pemberdayaan masyarakat yang menekankan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha dan sumber daya secara mandiri. Aspek ini mencakup peningkatan kapasitas, keterampilan, serta perubahan pola pikir agar masyarakat tidak bergantung pada bantuan pemerintah, melainkan mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan berdasarkan potensi yang dimiliki. Kemandirian menjadi ukuran keberhasilan pemberdayaan dalam mendorong masyarakat mengelola usaha secara produktif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian di Desa Uewajo, Kecamatan Bungku Utara, menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Morowali Utara bersama pemerintah desa telah diarahkan untuk membentuk kemandirian masyarakat nelayan. Program tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sarana perikanan, tetapi juga mencakup pendampingan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha perikanan secara mandiri.

Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan adalah pelatihan pengolahan hasil perikanan. Kegiatan ini memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada nelayan dalam mengolah hasil tangkapan menjadi produk bernilai tambah, seperti ikan asin dan abon ikan. Peningkatan keterampilan tersebut mendorong perubahan pola usaha dari penjualan ikan segar menuju pengembangan usaha berbasis pengolahan. Perubahan ini menunjukkan adanya pemanfaatan potensi sumber daya secara lebih optimal untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan.

Temuan penelitian juga menunjukkan munculnya inisiatif nelayan dalam mengembangkan strategi pemasaran. Sebagian nelayan mulai memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar. Pemanfaatan teknologi ini mencerminkan perubahan pola pikir dalam pengelolaan usaha, dari sistem tradisional menuju pendekatan yang lebih adaptif dan inovatif.

Kondisi tersebut sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Suaib (2023) yang menekankan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak diukur dari jumlah bantuan, tetapi dari kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi secara mandiri. Kemampuan mengambil inisiatif, mengelola usaha secara terencana, serta memanfaatkan peluang menjadi indikator terbentuknya keswadayaan dalam masyarakat.

Tingkat kemandirian masyarakat nelayan di Desa Uewajo belum sepenuhnya merata. Sebagian nelayan menyatakan tidak lagi menerima bantuan dalam periode tertentu sehingga dampak program tidak dirasakan secara langsung. Kondisi ini mendorong sebagian nelayan untuk mengandalkan usaha mandiri atau melakukan pekerjaan tambahan di luar sektor perikanan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa proses pemberdayaan belum menjangkau seluruh nelayan secara berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Irfat, Lampe and Mahfuzat, 2025) yang menunjukkan bahwa kemandirian masyarakat dipengaruhi oleh keberlanjutan

program dan akses terhadap kegiatan pemberdayaan. Penelitian (Kinseng, 2017) juga menunjukkan bahwa distribusi manfaat program yang tidak merata menghambat peningkatan kemandirian ekonomi nelayan. Hasil penelitian (Jumiati, 2018) menegaskan bahwa capaian pemberdayaan berbeda antar kelompok masyarakat karena dipengaruhi oleh perbedaan akses, sumber daya, dan tingkat keterlibatan dalam program.

Hasil penelitian di Desa Uewajo menunjukkan bahwa pemberdayaan pada aspek kemandirian telah memberikan dampak positif, terutama dalam peningkatan keterampilan pengolahan hasil perikanan, munculnya inisiatif pemasaran, serta perubahan pola usaha nelayan. Kemandirian yang terbentuk masih belum merata karena keterbatasan keberlanjutan program dan distribusi bantuan yang belum optimal.

Penguatan pemberdayaan diperlukan melalui keberlanjutan program, pemerataan akses, serta peningkatan kapasitas masyarakat secara menyeluruh. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa seluruh nelayan mampu mencapai kemandirian ekonomi dan mengembangkan usaha perikanan secara berkelanjutan.

4. Keberlanjutan

Keberlanjutan merupakan aspek fundamental dalam pemberdayaan masyarakat yang menekankan kemampuan masyarakat untuk menjalankan usaha secara terus-menerus tanpa merusak lingkungan serta tetap memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Dalam konteks masyarakat nelayan, keberlanjutan mencakup pengelolaan sumber daya perikanan secara bijak, pemeliharaan ekosistem laut, serta penerapan praktik usaha yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Hasil penelitian di Desa Uewajo, Kecamatan Bungku Utara, menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Morowali Utara telah diarahkan untuk mendukung keberlanjutan usaha nelayan. Program tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga mencakup kegiatan pembinaan dan pendampingan yang bertujuan membentuk pola kerja nelayan yang lebih terencana dan terorganisasi. Melalui kegiatan tersebut, nelayan didorong untuk mempersiapkan kebutuhan sebelum melaut, mengelola hasil tangkapan secara lebih efektif, serta menerapkan perencanaan dalam menjalankan usaha perikanan.

Program pemberdayaan juga memberikan pengetahuan terkait pengolahan hasil tangkapan agar memiliki nilai tambah ekonomi. Upaya ini mendorong nelayan untuk tidak bergantung pada penjualan ikan segar yang cenderung fluktuatif, melainkan mulai mengembangkan usaha berbasis pengolahan. Perubahan pola kerja yang lebih sistematis dan produktif menunjukkan adanya proses pembelajaran yang mendukung keberlanjutan usaha perikanan di tingkat masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan menurut Suaib (2023) yang menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan diukur dari kemampuan program dalam membentuk perubahan pola pikir, kebiasaan kerja, serta kapasitas masyarakat untuk mempertahankan usaha secara mandiri dalam jangka panjang. Ketika masyarakat mampu bekerja secara terencana dan mengelola usaha secara mandiri, maka keberlanjutan pemberdayaan mulai terbentuk.

Meskipun demikian, keberlanjutan program pemberdayaan di Desa Uewajo masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan sumber daya, seperti anggaran, fasilitas, dan tenaga pendamping, menjadi faktor utama yang memengaruhi konsistensi pelaksanaan program. Kondisi ini berpotensi menyebabkan penurunan intensitas program apabila tidak diimbangi dengan dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah dan instansi terkait.

Selain itu, terdapat variasi dalam persepsi masyarakat nelayan terhadap manfaat program. Sebagian nelayan merasakan peningkatan keterampilan dan kemampuan dalam mengelola usaha perikanan. Namun, sebagian lainnya menyatakan tidak lagi menerima dukungan program dalam periode tertentu sehingga manfaat yang dirasakan menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi manfaat program belum sepenuhnya merata di antara seluruh kelompok nelayan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi (Putri, Pageno and Mahfuzat, 2025) yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dan kapasitas masyarakat menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. Penelitian (Lingkuwa, Sasterio and Pradana, 2025) juga menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan dipengaruhi oleh kapabilitas aparatur, efektivitas implementasi program, serta tingkat partisipasi masyarakat. Sementara itu, penelitian (Nurlaili and Muhartono, 2017) menunjukkan bahwa keberlanjutan pemberdayaan masyarakat nelayan sangat dipengaruhi oleh konsistensi program serta pemerataan akses terhadap kegiatan pemberdayaan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan dalam aspek keberlanjutan di Desa Uewajo telah memberikan kontribusi positif, terutama dalam membentuk pola kerja yang lebih terencana dan meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha perikanan. Namun demikian, keberlanjutan program masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal dukungan sumber daya, konsistensi pendampingan, serta pemerataan distribusi manfaat program.

Penguatan keberlanjutan program perlu dilakukan melalui komitmen pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam menyediakan dukungan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pendampingan, serta memastikan akses program yang lebih merata. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat nelayan tidak hanya menghasilkan dampak jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini memberikan pencerahan mengenai permasalahan pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Uewajo, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara dengan menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan belum sepenuhnya mampu menghasilkan keberdayaan yang optimal dan berkelanjutan. Temuan utama penelitian mengindikasikan bahwa meskipun intervensi pemerintah melalui bantuan, pembinaan, dan kebijakan telah mendorong peningkatan kapasitas dasar nelayan, pemberdayaan yang terjadi masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh antar aspek kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi oleh sejauh mana program mampu menciptakan transformasi struktural dalam pola pikir, kapasitas, serta kemandirian masyarakat nelayan. Analisis temuan dalam konteks kajian pemberdayaan masyarakat pesisir memperkuat pemahaman bahwa pendekatan berbasis bantuan saja tidak cukup, melainkan perlu didukung oleh strategi yang sistematis, partisipatif, dan berorientasi jangka panjang. Temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian pemberdayaan dengan menegaskan pentingnya integrasi antar indikator pemberdayaan sebagai prasyarat keberhasilan program. Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki implikasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan yang lebih adaptif, dengan menekankan pemerataan akses program, penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta konsistensi pendampingan sebagai faktor kunci keberlanjutan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah yang terbatas pada satu lokasi serta penggunaan pendekatan kualitatif yang belum mampu memberikan pengukuran komparatif secara kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah kajian, mengombinasikan pendekatan metode, serta mengembangkan model pemberdayaan berbasis komunitas yang lebih kontekstual dan berkelanjutan guna memperkuat pemahaman tentang efektivitas pemberdayaan masyarakat pesisir di masa mendatang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Prof. Dr. Irwan Waris, M.Si dan Dr. Mahfuzat, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Uewajo serta masyarakat nelayan di Desa Uewajo Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara yang telah memberikan data, informasi, dan dukungan selama proses penelitian berlangsung. Dukungan dari berbagai pihak tersebut sangat membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Referensi

Bupati Morowali Utara (2019) *PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/173053/2019perdamorut1.pdf>.

Dewi, M.F. and Dadiara, F.S. (2022) “PEMBERDAYAAN KELOMPOK NELAYAN MELALUI PROGRAM SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) DI KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,” *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 7(1), pp. 82–100. Available at: <https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i1.2417>.

Habib, M.A.F. (2021) “KAJIAN TEORITIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN EKONOMI KREATIF,” *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy*, 1(2), pp. 82–110. Available at: <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>.

Irfat, Lampe, I. and Mahfuzat (2025) “Tata Kelola Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale di Desa Ululere, Morowali,” *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(5), pp. 359–382.

Judijanto, L. *et al.* (2023) “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Publik: Menilai Efektivitas Model Keterlibatan Warga,” *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 3(2), pp. 1779–1787. Available at: <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2.2367>.

Jumiati, I.E. (2018) “INOVASI PEMBERDAYAAN NELAYAN (STUDI KASUS PERUBAHAN KELEMBAGAAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM PEMBERDAYAAN NELAYAN TANGKAP DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA (PPN) KARANGANTU KOTA SERANG),” *Jurnal of Public Administration and Local Governance*, 2(1), pp. 1–21.

Kinseng, R.A. (2017) “Structugency: A Theory of Action,” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(2), pp. 127–137. Available at: <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i2.17972>.

Kusnadi, I.H. (2020) “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang Di Kabupaten Subang,” *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), pp. 30–57. Available at: <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i1.2338>.

Lingkua, C.L., Sasterio and Pradana, A. (2025) “Dynamic Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Mandula, Kecamatan Lembo Raya, Kabupaten Morowali Utara,” *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(5), pp. 398–411.

Nurlaili, N. and Muhartono, R. (2017) “PERAN PEREMPUAN NELAYAN DALAM USAHA PERIKANAN TANGKAP DAN PENINGKATAN EKONOMI RUMAH TANGGA PESISIR TELUK JAKARTA,” *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 12(2), p. 203. Available at:

<https://doi.org/10.15578/jsekp.v12i2.6481>.

Oktaviani, N.R., Alamsyah, M.N. and Rusdin, R.B. (2024) “PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA NUPABOMBA KECAMATAN TANANTOVEA KABUPATEN DONGGALA,” *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(3), pp. 14–26.

Pasaribu, P.A., Ahsan, S.C. and Husain, S. (2025) “OPTIMALISASI TEKNOLOGI GEOMEMBRAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI GARAM TALISE,” *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(3), pp. 190–203.

Presiden Republik Indonesia (2014) *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/27840/UU%20Nomor%2006%20Tahun%202014.pdf>.

Presiden Republik Indonesia (2016) *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/26338/UU%20Nomor%207%20Tahun%202016.pdf>.

Putri, N.S., Pageno, I. and Mahfuzat (2025) “Konflik Dalam Pergantian Perangkat Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu,” *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(4), pp. 179–189.

Ridha, M., Letak, P. and Chaedir, Z. (2017) *EKONOMIKA AGRIBISNIS (Teori dan Kasus) Copyright @ Diah Retno Dwi Hastuti*. Cet 1. Makassar: Perpustakaan Nasional, Katalog.

Saksono, H., Nissa', Z.N.A. and Suadi, S. (2023) “Small-Scale Fisher’s Livelihood Strategies: Findings from Case Studies in Several Indonesian Coastal Areas,” *Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada*, 25(1), p. 9. Available at: <https://doi.org/10.22146/jfs.82815>.

Saputri, D.K. and Murdiyanto, E. (2024) “Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Batik Giriloyo Padukuhan Karangkulon Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul,” *Jurnal of Agricultural Social and Business*, 3(2), pp. 120–125.

Sinaga, H. and Sitinjak, L. (2019) “STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAANNYA DI KELURAHAN SIBOLGA ILIR KECAMATAN SIBOLGA UTARA KOTA SIBOLGA,” *Jurnal Penelitian Terapan Perikanan dan Kelautan*, 1(1), p. 36.

Suaib (2023) *PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. Cet 1. Indramayu: CV. Adanu Abimata.

Suharto, E. (2010) *MEMBANGUN MASYARAKAT MEMBERDAYAKAN RAKYAT: KAJIAN STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEKERJAAN SOSIAL*. Cet 1. Bandung: PERPUSTAKAAN FAKULTAS POLITIK PEMERINTAHAN.

Sukraaliawan, I.N. (2020) “UPAYA PEMBERDAYAAN NELAYAN DI WILAYAH PESISIR KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG,” *Locus*, 12(1), pp. 101–119. Available at: <https://doi.org/10.37637/locus.v12i1.291>.

Susilowati, E. and Nainggolan, A. (2025) “PENUMBUHAN MOTIVASI DALAM PEMBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT DI DESA PANJALU KABUPATEN CIAMIS- JAWA BARAT,” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), pp. 36–42.

Tanjung, A.T. (2016) “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI KOTA GUNUNGSITOLI,” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 13(1), pp. 155–172. Available at: <https://doi.org/10.31113/jia.v13i1.77>.

Waris, I. *et al.* (2018) “STUDI TENTANG STRATEGI PEMBERDAYAAN NELAYAN DI PESISIR PANTAI TELUK TOMINI DALAM UPAYA PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN PARIGI MOUTONG,” *Prosiding Seminar Nasional II*, 1(2), pp. 73–88.

Waris, I. and Susanti, A. (2019) “EMPOWERMENT STRATEGY FOR FISHERMEN IN COASTAL AREAS OF THE GULF OF TOMINI AS AN EFFORT TO ACCELERATE AND EXPAND THE ECONOMIC DEVELOPMENT IN PARIGI MOUTONG REGENC,” *Asian Journal of Environment, History and Heritage*, 3(2), pp. 47–57.